

INDONESIA SEBAGAI TUAN RUMAH KTT GERAKAN NON BLOK X TAHUN 1992**DIKA DWIMAWAN WURYANTO**

Jurusan Pendidikan Sejarah
 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
 Universitas Negeri Surabaya
 Email : dikadwimawan94@gmail.com

Septina Alrianingrum

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
 Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Gerakan Non Blok (GNB) pertama kali dibentuk pada awal tahun 1960-an, yang dipelopori negara-negara merdeka untuk melancarkan aksi politiknya menghadapi situasi dunia dengan memuncaknya perang dingin antara blok Barat dengan blok Timur. Lahirnya Gerakan Non Blok berkaitan dengan Konferensi Asia Afrika (KAA) yang dilaksanakan di Bandung tanggal 18-24 April 1955 yang dihadiri 29 kepala negara dan pemerintahan dari benua Asia dan Afrika yang baru saja merdeka.

Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser, Presiden Ghana Kwame Nkrumah, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Presiden Indonesia Soekarno, Presiden Yugoslavia Joseph Broz Tito, kelima tokoh dunia ini dikenal sebagai pendiri Gerakan Non Blok. Pemikiran-pemikiran kelima kepala negara ini menjadi asal usul Gerakan Non Blok. Indonesia yang termasuk kedalam pendiri GNB sudah sepantasnya menjadi tuan rumah pada acara KTT. Tahun 1992 Indonesia menjadi penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi GNB X yang diadakan di Jakarta tanggal 1-6 September 1992. Persiapan Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi GNB X yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1) Bagaimana persiapan Indonesia saat menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi ke X ? 2) Bagaimana proses pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok X ? 3) Apa hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok ke X ?. Metode yang digunakan adalah penelitian sejarah yaitu, heuristik dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber koran, jurnal, buku dan wawancara, kritik untuk menyeleksi sumber yang valid, interpretasi digunakan untuk menghubungkan fakta-fakta sejarah yang dianalisis berdasarkan pengetahuan penulis, dan historiografi yaitu tahapan terakhir untuk merangkai fakta sejarah secara kronologi menjadi sebuah karya tulis sejarah.

Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah Indonesia melakukan persiapan Konferensi Tingkat Tinggi GNB X dengan baik dan menunjukkan Indonesia memang siap menjadi tuan rumah dilihat dari persiapan dari segi fasilitas, keamanan dan penyambutan. Pelaksanaan sidang KTT berjalan sukses dan lancar, meskipun sidang berjalan penuh perdebatan namun konsensus telah dicapai yang melahirkan hasil bernama Pesan Jakarta dan resolusi mengenai masalah Somalia dan resolusi tentang pembentukan HLWG. Pesan Jakarta diharapkan memberikan dampak yang cukup berarti untuk membuat tatanan dunia yang baru, adil dan damai.

Kata Kunci : KTT, GNB, Hasil Konferensi**Abstract**

Non-Aligned Movement (NAM) was first formed in the early 1960s, who pioneered state-independent countries that have a strong determination in waging political actions to face the world situation by mounting a cold war between the Western bloc with the Eastern bloc. The birth of the Non-Aligned Movement with regard to the Asian-African Conference (KAA) held in Singapore on 18 April 1955-24 April 1955, which was attended by 29 heads of state and government from Asia and Africa of the newly independent from colonial rule.

Egyptian President Gamal Abdul Nasser, the President of Ghana Kwame Nkrumah, Prime Minister of India Jawaharlal Nehru, Indonesian President Sukarno, Yugoslav President Joseph Broz Tito's fifth world leaders known as the founder of the Non-Aligned Movement. Thoughts fifth head of state is the origin of the Non-Aligned Movement. Indonesia, which belongs to the founders of the Non-Aligned Movement is appropriate to host the Presidential Summit. 1992 Indonesia to host the X NAM Summit held in Jakarta on September 1 to 6, 1992. Preparation of Indonesia to host the NAM Summit X is the main focus of research.

The problems in this research are: 1) How to prepare Indonesia currently hosts the Summit to X? 2) How does the process of implementation of the High-Level Conference on Non-Aligned Movement X? 3) What was the outcome of the World Summit of Non Aligned Movement to X?. The method used is the historical research with 4 stages of research. Heuristics is done by collecting a variety of sources of newspapers, journals, books and interviews.

Internal criticism for selecting a valid source. Interpretation is used to connect historical facts are analyzed based on knowledge penulis. Historiografi is the last step to assemble the facts of history chronologically into a work of historical writing.

The results of the study are Indonesia preparations NAM Summit X well and showed Indonesia was ready to host visits of preparation in terms of facilities, security and reception. At the trial Summit was held for 7 full days running successfully and smoothly without any hitch at all, despite the contentious trial run, but consensus has been achieved that gave birth to the results called Message Jakarta and resolutions on the issue of Somalia and the resolution on the HLWG. Message Jakarta is expected to provide a significant impact to create a new world order, fair and peaceful.

Keywords: Summit, NAM, Conference Result

PENDAHULUAN

Setiap negara yang ada di dunia ini memiliki suatu sistem atau kebijakan politik baik politik dalam negeri maupun politik luar negeri tidak terkecuali negara Indonesia. Kebijakan tersebut muncul bukan semata-mata Indonesia ingin dikenal oleh negara-negara lain, namun merupakan bagian dari kebijakan politik luar negeri Indonesia. Indonesia memiliki kebijakan politik luar negeri yang didasari pada Rumusan dalam alinea I dan alinea IV Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar hukum yang kuat bagi politik luar negeri RI. Namun dari rumusan tersebut. Pengertian bebas dan aktif menurut A.W Wijaya merumuskan arti “bebas” sebagai hal yang tidak terikat oleh suatu ideologi atau oleh suatu politik negara asing atau oleh blok negara-negara tertentu, atau negara-negara adikuasa (super power). “Aktif” artinya dengan sumbangan realistik giat mengembangkan kebebasan persahabatan dan kerjasama internasional dengan menghormati kedaulatan negara lain.

Sementara itu Mochtar Kusumaatmaja merumuskan bebas aktif sebagai politik luar negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain.¹ Politik luar negeri berhubungan dengan proses pembuatan keputusan untuk mengikuti pilihan jalan tertentu. Politik luar negeri diartikan sebagai “suatu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional.”

Pada masa orde baru, sendiri kebijakan politik luar negeri termasuk bidang dalam pemerintahan orba yang dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Hal yang terpenting dan menjadi prioritas dalam politik luar orba adalah pembangunan dan stabilitas. Hal ini menjadi panduan dalam politik luar negeri orba yang menjadi antitesa dari politik luar negeri orde lama.

Orde lama atau masa demokrasi terpimpin menjadikan politik luar negerinya sebagai alat untuk condong ke blok timur. Hal ini kemudian diubah oleh orba, salah satunya memutuskan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Pada masa orde baru kerja sama Indonesia dengan organisasi Gerakan Non Blok (GNB). GNB semakin ditingkatkan sehingga membuat Soeharto menjadi pemimpin organisasi GNB pada Konferensi Tingkat Tinggi ke-10 yang diselenggarakan di Jakarta.

Selaku ketua GNB waktu itu, Indonesia juga menghidupkan kembali dialog konstruktif Utara-Selatan berdasarkan saling ketergantungan yang setara (*genuine interdependence*). Dialog ini untuk membahas kesamaan kepentingan dan manfaat, serta tanggung jawab bersama. Selain itu, Indonesia juga mengupayakan penyelesaian masalah utang luar negeri negara-negara berkembang miskin *Heavily Indebted Poor Countries* (HIPC) yang terpadu, berkesinambungan dan komprehensif. Konferensi Tingkat Tinggi GNB ke-10 di Jakarta sepakat untuk mengintensifkan kerja sama Selatan-Selatan berdasarkan prinsip *collective self-reliance* guna memperkuat kerja sama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengambil judul “Indonesia sebagai Tuan Rumah Konferensi Tingkat Tinggi GNB X Tahun 1992”. Negara Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto mendapatkan kesempatan menjadi ketua GNB sekaligus menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi GNB X untuk pertama kalinya. Indonesia merasa dituntut untuk melakukan perubahan pada GNB dan tatanan dunia baru setelah berakhirnya perang dingin dan ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk berperan aktif dalam organisasi internasional.

Dalam hal ini, penulis akan mengkaji tentang Indonesia sebagai Tuan Rumah Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok X Tahun 1992 Berdasar pada hal tersebut, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

¹Teuku Rezasyah, *Politik Luar Negeri Indonesia : Antara Idealisme dan Praktik*, (Bandung: Humaniora, 2008), hlm. 15.

1. Bagaimana persiapan Indonesia saat menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi ke X ?
2. Bagaimana proses pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi GNB X ?
3. Apa hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi GNB ke X ?

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah merupakan suatu proses pengujian, dan analisis sumber atau laporan dari masa lampau secara kritis. Tujuan penelitian untuk membuat sebuah rekonstruksi masa lampau secara sistematis maupun obyektif dengan melalui cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi serta mensintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Adapun langkah-langkah dalam metode penelitian sejarah meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.²

Prosedur heuristik dilakukan untuk mendapatkan sumber dengan kredibilitas data yang tinggi, baik sumber-sumber original, otentik, primer, serta sekunder. Penelusuran sumber primer dilakukan penulis dengan menelusuri dokumen dan arsip yang tersimpan pada Perpustakaan Medayu Agung, dalam arsip dan dokumen tersebut terdapat Surat Keputusan Presiden tentang keputusan mengenai pembentukan panitia untuk Konferensi Tingkat Tinggi GNB X.

Pencarian sumber sekunder dilakukan penulis dengan membaca beberapa buku dan hasil penelitian yang membahas peristiwa seputar Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi GNB X. Pada pencarian data dari beberapa sumber sekunder penulis memperolehnya dari berbagai perpustakaan, yaitu Perpustakaan Daerah Jawa Timur, Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya, Perpustakaan Medayu Agung, dan Perpustakaan Jurusan Pendidikan Sejarah Unesa.

Pada tahap selanjutnya yakni pada tahap interpretasi data dilakukan setelah semua fakta dan data terkumpul dan disusun secara kronologis. Penulis dapat menarik sebuah kesimpulan atau diperoleh makna-makna yang saling berkaitan dari fakta-fakta yang diperoleh mengenai Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok X. Langkah terakhir adalah historiografi yang merupakan proses terakhir pada penulisan metode penelitian sejarah. Pada tahapan historiografi peneliti mulai melakukan penulisan sejarah

secara kronologi, dimulai dengan menulis awal mula pembentukan GNB, tujuan dibentuk GNB, hubungan Indonesia dengan anggota GNB, persiapan Indonesia saat menjadi tuan rumah, proses pelaksanaan konferensi dan hasil dari konferensi itu sendiri. Kemudian hasil dari tulisan ini akan dipublikasikan dan harus bisa dipertanggungjawabkan secara teoritis dan konseptual menurut ilmu sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah lahirnya Gerakan Non Blok

Gerakan Non Blok (GNB) dibentuk awal tahun 1960-an, dipelopori dari negara-negara merdeka yang memiliki tekad kuat dalam melancarkan aksi-aksi politiknya menghadapi situasi dunia yang ditandai dengan memuncaknya perang dingin antara blok Barat dengan blok Timur. Lahirnya GNB berkaitan dengan Konferensi Asia Afrika (KAA) yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18 April 1955 – 24 April 1955. KAA dihadiri oleh 29 kepala negara dan kepala pemerintahan dari benua Asia dan Afrika yang baru saja merdeka dari penjajahan.

Tujuan dari Konferensi Asia Afrika yang diadakan di Bandung pada saat itu untuk mengidentifikasi dan mendalami masalah-masalah dunia pada saat itu, serta merumuskan kebijakan bersama negara pada tatanan hubungan internasional. Selain itu, konferensi ini juga mengeluarkan resolusi menentang penjajahan, diantaranya penjajahan Perancis atas Guinea Baru. KAA juga menjadi pendahuluan dari terbentuknya Organisasi GNB.

Sejak Konferensi Asia Afrika di Bandung ini dilaksanakan, proses pendirian GNB menjadi kenyataan, dan dalam proses ini tokoh-tokoh yang memegang peran kunci sejak awal adalah Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser, Presiden Ghana Kwame Nkrumah, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Presiden Indonesia Soekarno, Presiden Yugoslavia Joseph Broz Tito kelima tokoh dunia ini dikenal sebagai pendiri GNB. Pemikiran-pemikiran kelima kepala negara inilah yang menjadi asal usul GNB, sehingga kelima kepala negara ini mendapatkan julukan *The Initiatif Five* (Inisiatif kelima orang).³

Pada tahun 1960 kelima tokoh tersebut meyarakan resolusi untuk meredakan ketegangan Timur dan Barat di Majelis Umum PBB ke 25, resolusi ini tidak hanya menjadi isapan jempol belaka ataupun opini yang berkembang di dalam Majelis Umum PBB ke 25 resolusi

² Aminuddin Kasdi, *Memahami Sejarah*, (Surabaya : Unesa University Press, 2011), hlm. 10-11.

³ Mohammad Hatta, *Indonesia dan Non-Alignment*, (Jakarta : Bulan Bintang 1982), hlm. 11.

segera dilakukan dengan bentuk gerakan yang tak mau memihak dan terlibat oleh pihak Barat dan Timur. Forum Non Blok ini bisa juga disebut anak kandung Konferensi Bandung (KAA Bandung) dikarenakan di dalam Konferensi Bandung tersebut ide-ide untuk membentuk GNB muncul menurut AbdulGani, Sekjen Konferensi Asia Afrika.⁴

Indonesia yang termasuk sebagai pencetus atau pelopor GNB suatu saat akan menjadi penyelenggara atau tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi.⁵ Non Blok atau Non Aligned merupakan suatu pandangan politik luar negeri suatu negara dimana negara tersebut memiliki kebebasan menentukan jalan politiknya sendiri tanpa mengikut sertakan atau bergantung kepada salah satu blok adidaya yang sedang bertikai. Penggunaan istilah *Non-Alignment* (tidak memihak) pertama kali dilontarkan PerdanaMenteri India Jawaharlal Nehru dalam pidatonya di Srilangka tahun 1957.⁶

Sejak saat tersebut, *non aligned* sebagai salah satu dari komponen prinsip dasar dari GNB dan prinsip *non aligned* ini dapat diterima secara luas terutama oleh negara-negara yang baru saja bebas dari penjajahan atau berpisah dari negara asal lalu mendirikan negara sendiri. GNB dicanangkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang dihadiri 25 negara dari Asia, Afrika, Eropa, dan Latin Amerika diselenggarakan di Biograd (Belgrade), Yugoslavia pada tahun 1961.

Presiden Broz Tito, menjadi pemimpin pertama dalam GNB. Sejak pertemuan Belgrade tahun 1961. Faktor yang melatarbelakangi GNB ini bukan hanya pertikaian antara blok Barat dan Timur saja tapi banyak faktor-faktor pendukung dibentuknya GNB ini seperti :

1. Adanya kecemasan negara-negara yang baru merdeka dan negara yang sedang berkembang, sehingga negara-negara tersebut menghendaki perdamaian kedua kubu agar tidak menjadi konflik terbuka atau ketegangan dunia.
2. Dokumen Brioni tahun 1956 yang ditandatangani oleh Presiden Yugoslavia Joseph Broz Tito, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, dan Presiden Mesir Abdul Gamal Nasser yang bertujuan mempersatukan negara-negara di dunia tanpa ada blok baik Barat atau Timur
3. Uni Soviet membangun pangkalan militer di Kuba secara besar-besaran dimana Uni Soviet mengirim sebagian mengirim militer dan persenjataan baik nuklir atau non nuklir, hal ini menyebabkan Amerika Serikat khawatir akan keamanan negaranya. Kejadian ini yang dikenal dengan nama Krisis Kuba tahun 1961.

B. Strategi Non Blok dan Asas-asas GNB

Esensi dalam perbedaan dan kerancuan di antara istilah-istilah seperti netralitas, netralisme, dan non blok namun dalam ilmu hubungan internasional ketiga istilah ini berarti tipe orientasi yang sama, di mana suatu negara tidak melibatkan kemampuan militer dan, terkadang dukungan diplomatiknya terhadap tujuan-tujuan negara lain. Sedangkan untuk strategi kebijakan luar negeri non blok tidak melibatkan kemampuan militer terhadap tujuan-tujuan negara lain⁷. Bentuk non blok yang paling umum dapat dilihat diantara negara-negara yang atas pilihan dan prakarsa sendiri dan tidak adanya jaminan negara lain menolak bergabung secara militer dengan kepentingan dan tujuan negara-negara adidaya. Meskipun negara non blok memberikan dukungan secara diplomatik kepada suatu anggota blok atau pemimpin blok mengenai isu-isu tertentu yang sedang berkembang.

Bagaimanapun juga negara non blok harus tetap menahan diri untuk tetap tidak memihak secara diplomatik salah satu blok mengenai seluruh isu yang ada di dunia, peran negara-negara non blok disini adalah independen dalam sistem secara keseluruhan yang ada, meskipun negara non blok mungkin secara militer, ideologis, dan ekonomi mereka satu tujuan dan berkerjasama dalam artian mereka bersekutu.

Strategi non blok yang sukses mungkin akan tampak dalam sistem internasional dengan struktur tersebar dan struktur blok yang tersebar, dalam sistem dua kutub dimana semua negara yang bertentangan tidak ada tempat atau toleransi bagi negara yang mencoba tetap netral atau tidak terlibat dalam suatu konflik antar blok.⁸

Orientasi non blok bisa disamakan dengan sejumlah pertimbangan dan tekanan dalam negeri itu sendiri, banyak yang telah menerapkan orientasi ini sebagai salah satu langkah untuk mendapatkan suatu pengakuan atau konsensi ekonomi secara penuh dari kedua blok, membuat pengakuan secara legitimasi dan permanen dalam perencanaan militer dengan suatu blok, tindakan menutup blok lain sebagai kemungkinan sumber pasok, pasar, dan bantuan luar negeri. Beberapa pemerintahan di Dunia Ketiga mempunyai komitmen yang besar untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai secepat mungkin, maka dari itu hanya ada sedikit dari pemerintahan Dunia Ketiga yang bisa berhasil membatasi perdagangan internasionalnya.

⁴Majalah Tempo, 5 September 1992, hlm. 25.

⁵Majalah Straits Times, 17 Agustus 1987, hlm. 18.

⁶RajeshKumar, *Non-Alignment Policy of Indonesia*, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1997), hlm. 12.

⁷Abubakar Eby Hara, *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri dari Realisme sampai Konstruktivisme*, (Bandung : Nuansa, 2011), hlm. 57.

⁸*Ibid.*, hlm. 115.

C. GNB Pasca Perang Dingin

Meredanya perang dingin antara blok barat dan blok timur membuat munculnya suatu pertanyaan mengenai apakah masih relevan apabila GNB masih ada? Menurut Ruslan Abdulgani Ketua Tim P7, kehadiran GNB masih diperlukan. Namun masa depan GNB sendiri bergantung kepada semua anggotanya tentang bagaimana kedepannya dalam menyikapi atas perubahan tata politik, ekonomi, dan keamanan dunia.

Seperti negara-negara miskin atau tidak maju sangat bertimpang balik dengan negara maju dimana negara miskin jarang memiliki fasilitas pendidikan yang maju layaknya negara maju. Lebih dari 80% perangkat lunak dan perangkat keras hanya dimiliki oleh kelompok regional tiga negara : Amerika Utara, Eropa, Jepang. Akibat dari disparitas dalam lingkup dan kapabilitas penelitian antara ketiganya dengan negara-negara lain, terutama negara-negara berkembang.⁹

Dalam kasus disparitas pendapatan diharapkan GNB dapat menunjukkan bahwa bisa menjadi hambatan-hambatan menuju kesetaraan antara negara maju dengan negara miskin, agar tidak muncul agresi militer dan tindakan terorisme internasional yang dilakukan pemimpin negara miskin dan kecil GNB harus memberi peringatan kepada negara maju bahwa ketidakadilan dalam bidang politik, ekonomi, dan keamanan yang akan menjadi penyebab konflik antar negara.

Hampir semua struktur politik, ekonomi, dan keamanan internasional tidak berpihak kepada negara-negara anggota GNB, para anggotanya harus selalu mendorong upaya-upaya untuk merubah sistem baik di dalam atau di luar struktur PBB, namun GNB juga harus bisa menciptakan prinsip persamaan internal dan keadilan sosial yang adil dan sesuai dengan tatanan dunia internasional. Negara-negara GNB diwajibkan menyadari sepenuhnya berbagai isu-isu dunia pada saat ini seperti isu politik, ekonomi, dan militer yang saling berkaitan dan mempengaruhi distribusi kekuasaan, kekayaan dan persenjataan yang tidak adil di seluruh dunia.

Tugas negara-negara non blok tentu tidak akan selesai meskipun sistem internasional yang lebih adil sudah tercipta, anggota GNB juga harus bisa menciptakan struktur domestik serta tata regional yang adil dan damai bagi negara-negara miskin agar

mencegah timbulnya konfrontasi atau agresi militer, melakukan suatu tindakan terorisme, dan pemberontakan senjata.

Diharapkan GNB dapat memanfaatkan berkurangnya konfrontasi serta adanya perkembangan semangat kerja sama internasional untuk menyambut abad yang ke 21, untuk itu pemimpin dan pemerintahan juga para penerus GNB harus bisa membuktikan kepada dunia bahwa komitmen terhadap perdamaian internasional dan keadilan bagi seluruh umat manusia bukan hanya sebuah retorika dan bahan pembicaraan saja tetapi juga dalam tindakan-tindakan yang nyata sebagai usaha bersama dalam menjaga komitmen dibentuknya GNB.

D. Hubungan Indonesia dengan Negara-negara GNB

Hubungan Indonesia dengan GNB bisa dikatakan layaknya hubungan orang tua dengan anaknya, dikarenakan Indonesia sendiri ikut serta membangun GNB sejak awal berdiri. Semua ini tidak lepas dari presiden Soekarno dimana Soekarno menginginkan negara-negara yang baru saja merdeka melakukan politik konfrontasi terhadap negara-negara mapan agar menghindari intervensi dan eksploitasi.

Campur tangan Indonesia terhadap GNB semakin dominan setelah Soekarno ditunjuk untuk menyampaikan undangan konferensi GNB. Negara yang akan diundang diberikan kriteria agar sesuai dengan visi dan misi GNB, kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan politik bebas berdasarkan konsistensi damai, tak terikat, dan memperlihatkan usaha mendukung politik tersebut.
2. Konstensi mendukung gerakan-gerakan kemerdekaan suatu negara yang terjajah
3. Tidak termasuk aliansi kekuatan militer di dalam konflik negara-negara adikuasa baik blok barat dan blok timur.
4. Bila terlanjur mengizinkan basis militer, perijinan dari basis militer ini harus tidak dibuat dalam kaitan dengan pertikaian antar negara adikuasa
5. Jika memiliki organisasi militer bilateral atau regional harus tidak dibawah kekuasaan negara adikuasa.

Kriteria-kriteria diatas telah disepakati oleh ketiga negara sponsor penyelenggara yaitu Yugoslavia, Indonesia, Mesir dan negara yang akan di undang ke konferensi GNB pertama. Ikut campur negara Indonesia disini sangat signifikan dikarenakan termasuk pengagas kriteria peserta yang di ijin

⁹ HarisMunandar, *Politik, Ekonomi, Strategi*, (Jakarta : PT Gramedia, 1995), hlm. 102.

mengikuti jalannya konferensi GNB pertama. Di dalam konferensi Belgrado atau konferensi GNB pertama pada tanggal 1-6 September 1961 banyak muncul pemimpin negara-negara Asia-Afrika yang dimana negara-negara di kedua benua tersebut mayoritas baru saja mendapatkan kemerdekaannya sebut saja negara Indonesia yang dipimpin Soekarno dan Nkrumah dari negara Ghana.

Sikap presiden Soekarno yang anti barat, anti imperialisme dan kolonialisme merupakan pandangan yang baru terhadap konsep non blok, politik konfrontasi Indonesia tidak pandang darimana negaranya atau siapa negaranya. Contohnya, Malaysia yang terkena dampak konfrontasi dari Indonesia karena terlalu berpihak kepada Inggris (blok barat) dan sikap Indonesia kepada Malaysia ini kurang diperhatikan oleh antar sesama bangsa Asia. Soekarno bermaksud mendirikan poros Jakarta-Peking untuk menyetarakan politik luar negeri Indonesia dengan konsep dan tujuan politik China.

Adanya satu pemikiran yang sama antara Indonesia dan China dimana kedua negara ini ingin tidak adanya pengaruh barat yang ada di benua Asia khususnya Asia Tenggara. Layaknya konferensi yang pertama perbedaan kedua kelompok mencuat kembali, adanya kelompok yang condong ke poros Jakarta Peking dibawah negara Indonesia dan kelompok di bawah India yang menentang adanya poros Jakarta Peking. Konferensi kedua ini tidak menghasilkan sesuatu yang nyata bagi penyelesaian masalah yang sedang terjadi dunia.

Pada masa kepemimpinan Soeharto negara Indonesia mulai mengikuti forum-forum internasional seperti ASEAN, PBB, Kelompok 77 dengan karakter Soeharto yang sederhana dan rendah hati membuat negara-negara yang lain menghormati Soeharto dan pada umumnya menghormati negara Indonesia.

E. Latar Belakang KTT Gerakan Non Blok X di Jakarta

Presiden Soeharto yang memiliki keinginan tinggi untuk bisa memiliki profil tingkat tinggi dalam forum internasional dan Gerakan Non Blok (GNB). GNB melakukan usaha untuk mendapatkan dukungan-dukungan dari negara anggota GNB seperti dari negara-negara benua hitam Afrika. Soeharto mengundang pimpinan Kongres Nasional Afrika Nelson Mandela untuk mengunjungi Indonesia pada bulan Oktober 1990 selama kunjungan di negara Indonesia. Nelson Mandela dianugerahi Bintang Republik Indonesia penghargaan sipil tertinggi negara Indonesia. Nelson Mandela tidak hanya diberikan

suatu penghargaan, Soeharto juga memberikan US\$ 10 juta untuk Kongres Nasional Afrika atas perjuangan untuk mengakhiri politik apartheid di negara Afrika Selatan.¹⁰

Keinginan Indonesia untuk memimpin GNB sudah ada sejak pada tahun 1985 ketika diadakan konferensi tingkat Menteri GNB di negara Angola, pada saat itu Indonesia memiliki pesaing dari benua Afrika yaitu negara Zimbabwe, namun negara Indonesia mundur dari pencalonan sebagai ketua GNB dikarenakan Indonesia ingin memberikan kesempatan kepada Zimbabwe. Pada saat itu negara Indonesia memiliki saingan dari negara Nikaragua, keseriusan Nikaragua ditunjukkan oleh Menteri Luar Negeri Miguel D'Esconto menyebutkan "seluruh negara Amerika Latin telah memberikan satu suara untuk memilih Nikaragua sebagai ketua GNB."¹¹ Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas menyampaikan bagaimana kriteria ketua GNB dan tidak menyebut siapa yang mendukungnya, menurutnya ketua GNB harus memiliki hubungan baik dengan negara-negara super power.¹²

Pada hari berikutnya Ali Alatas menyampaikan apa yang disarankan oleh Menteri Luar Negeri Zimbabwe, bahwa Indonesia dan Nikaragua sepakat mengundurkan diri dari pencalonan ketua GNB. Hal ini semua dilakukan demi kesatuan GNB. Akhirnya negara Yugoslavia menjadi ketua GNB yang masa periode kepemimpinannya berakhir pada tahun 1992.¹³

September 1991 pertemuan tingkat Menteri GNB diadakan di ibukota negara Ghana tepatnya di Accra. Indonesia kembali bersaing dengan negara Nikaragua untuk perebutan ketua GNB periode 1992-1995. Namun pernyataan yang mengejutkan disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Nikaragua Ernesto Leal Sanchez bahwa negara Nikaragua akan mundur dari pencalonan ketua GNB. Ernesto merasa Nikaragua belum sepenuhnya siap menjadi ketua. Hal ini disebabkan negerinya masih proses rujuk nasional akibat perang saudara yang baru saja usai dan keadaan ekonomi Nikaragua dalam masa krisis.¹⁴ Selama pertemuan tingkat Menteri GNB di Ghana, pada akhirnya negara Indonesia secara aklamasi terpilih menjadi ketua GNB periode tahun 1992-1995.

¹⁰ Untuk melihat kondisi peralihan Soekarno kepada Soeharto, lihat M.C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since 1300* (California: Stanford University Press, 1993), hlm. 284-303.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 30.

¹² Hatta Mohammad, *Indonesia dan Non-Alignment*. Hlm.145

¹³ Hans J Morgenthau, *Politik Antar Bangsa*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1991), hlm. 617.

¹⁴ Jawa Pos, Senin 31 Agustus 1992, hlm. 6

F. Persiapan Indonesia terhadap KTT GNB ke X

Presiden Soeharto mengeluarkan keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 50 tahun 1991 mengenai pembentukan panitia nasional KTT GNB ke X. Dalam keputusan tersebut presiden menetapkan fungsi dan tujuan panitia dalam melaksanakan persiapan Konferensi Tingkat Tinggi GNB X. Dalam keputusan presiden ini juga disebutkan mengenai susunan panitia KTT GNB ke X, dan berikut adalah susunan panitia tersebut :

1. Ketua : Menteri atau Sekretaris Negara
2. Wakil Ketua : Menteri Luar Negeri
3. Sekretaris Jenderal : Rais Abin yang dibantu oleh :
 - a. Ketua Bidang Persidangan : Nana S. Sutresna
 - b. Ketua Bidang Dukungan Umum : H. Abdul Kadir.¹⁵

Tidak hanya persiapan mengenai kepanitian saja yang dipersiapkan Indonesia pada masa itu namun persiapan lainnya contohnya seperti fasilitas, keamanan dan kenyamanan Jakarta yang menjadi tempat perhelatan GNB yang ke X ini. Untuk mempersiapkan fasilitas bagi delegasi Indonesia telah menyiapkan hotel-hotel mewah yang ada di Jakarta dan gedung JICC diberikan beberapa buah layar tancap dan televisi agar yang hadir pada konferensi nantinya bisa mengikuti dengan baik. Dalam segi keamanan di konferensi ini Indonesia telah menugaskan ribuan personel tentara dan kepolisian dari segala kesatuan serta ratusan pemadam kebakaran dan paramedis juga telah dipersiapkan.

Indonesia melakukan persiapan besar-besaran seperti itu karena ingin menunjukkan kepada negara-negara delegasi bahwa Indonesia memang pantas menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi GNB X ini. Persiapan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Indonesia namun juga dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimana melakukan himbauan kepada masyarakat agar tidak berjualan disekitar daerah yang dianggap bisa merusak keindahan kota Jakarta, pemerintah Provinsi DKI juga membersihkan atau merapikan taman-taman kota, jembatan penyebrangan dan tempat-tempat yang menjadi ikon Ibukota Jakarta dijadikan lebih elok dipandang.

G. Upacara Pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi GNB X

Pada tanggal 1 September 1992 pada hari Selasa pukul 09.00 WIB, presiden Soeharto selaku ketua GNB membuka KTT GNB ke X yang bertempat di Jakarta International Convention Center, Soeharto yang menjabat sebagai ketua memberikan pidato pembukaan dan penyambutan kepada delegasi-delegasi yang hadir. Inti dari pidato yang disampaikan oleh Soeharto adalah berkembangnya GNB tidak lepas dari pemimpin yang berdedikasi tinggi. GNB sendiri memiliki makna solidaritas yang tinggi antar sesama anggota dari pertama kali dibentuk hingga pada saat ini serta adanya prinsip-prinsip moral dan pandangan yang satu tujuan yang menjadi landasan awal GNB terbentuk.¹⁶

Pidato yang disampaikan tidak hanya membicarakan organisasi yang berdiri pada tahun 1961 tersebut Soeharto juga menyampaikan tentang isu-isu yang sedang terjadi di dunia pada saat ini. Isu-isu tersebut antara lain Hak Asasi Manusia yang harus ditingkatkan perlindungannya agar semua umat manusia memiliki hak hidup yang sama seperti yang lainnya. Soeharto juga berpesan bahwa GNB juga harus berperan dalam penyelesaian konflik-konflik dimana saja seperti konflik Bosnia dan Konflik yang ada di Somalia mengingat korban yang terus meningkat. Soeharto meminta kepada seluruh anggota GNB bergerak cepat dan tegas untuk melakukan upaya perdamaian kepada pihak yang sedang bertikai serta memberikan bantuan kepada korban-korban tersebut.

GNB hendaknya menempatkan permasalahan pembangunan dan kerjasama internasional di bidang ekonomi harus lebih adil dan peningkatan kerja sama Selatan-Selatan harus dilakukan agar tidak terjadi disparitas antar negara. Upaya yang harus dilakukan melakukan pendekatan secara baik-baik agar hutang negara terbelakang tersebut dihapus agar negara tersebut tidak terlalu memiliki beban berat.

H. Pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi GNB X

Pada pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi yang dilakukan pada hari Selasa-minggu ini membahas mengenai permasalahan di bidang politik, ekonomi dan sosial. Negara-negara anggota GNB diharapkan pada konferensi saat ini memikirkan solusi mengenai permasalahan yang sedang terjadi di dunia pada saat ini utamanya masalah yang sedang dihadapi oleh negara anggota GNB.

¹⁵Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1991 Tentang Pembentukan.

¹⁶ Koran Surabaya Post, 1 September 1992, hlm. 4.

Permasalahan politik dan ekonomi adalah bahasan yang paling sering mencuat karena pada konferensi kali ini diharapkan bisa menciptakan kondisi politik dan ekonomi dunia yang lebih baik dan adil bagi semua negara yang ada di dunia. Konflik politik yang sedang terjadi di Bosnia dan Palestina juga dibahas dalam konferensi kali ini karena negara-negara anggota ingin menyelesaikan konflik tersebut. Negara-negara anggota tidak ingin melihat kedua negara ini hancur dan tidak melakukan suatu tindakan karena kedua negara ini adalah anggota GNB.

Perbedaan pendapat mencuat ketika membahas mengenai pembentukan sekretariat untuk GNB, hal ini diusulkan delegasi dari Zimbabwe dan Bangladesh dengan tujuan pembentukan sekretariat ini akan memperlancar program-program yang akan dilakukan Gerakan Non Blok sendiri dan dapat memberikan koordinasi kelanjutan kerja yang muncul dari keputusan-keputusan yang telah disepakati setelah Konferensi Tingkat Tinggi dilaksanakan. Sekretariat ini dibentuk akan menimbulkan bayangan birokrasi besar dan kewajiban keuangan yang besar pula tetapi diluar bayangan tersebut hal-hal seperti itu akan menjadikan gerakan ini semakin kuat, semangat dan dukungan kepada ketua Gerakan Non Blok yang terus menerus tiada henti.

Penguatan kerjasama Selatan-Selatan juga dibahas agar negara Selatan tidak selalu bergantung kepada negara Utara, negara Selatan-Selatan diharap bisa bekerjasama di segala bidang. Negara Selatan-Selatan juga diharapkan bisa memenuhi kebutuhan negara sendirinya sendiri yang nantinya akan memperkuat negara Selatan itu sendiri.

I. Hasil Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok X

Setelah konferensi berakhir pada tanggal 6 September 1992, GNB menghasilkan putusan yang disebut Pesan Jakarta. Pesan Jakarta ini sendiri dirumuskan oleh Mantan Menteri Luar Negeri Indonesia Mochtar Kusumaatmadja menurutnya namanya dulu adalah Deklarasi Jakarta bukan Pesan Jakarta. Pesan Jakarta membuat beberapa keputusan untuk membentuk tatanan dunia baru yang lebih baik terutama dalam bidang politik internasional. Rumusan Pesan Jakarta disusun untuk

membuat kesepakatan bersama antar anggota Gerakan Non Blok dalam mewujudkan hubungan dan politik internasional yang bebas dan aktif.

Pada saat ini suatu perdamaian dan kestabilan dunia tergantung terhadap faktor ekonomi, sosial, politik dan militer. Kurangnya suatu tindakan untuk menanggapi perkembangan ekonomi dan kemajuan sosial membuat semakin meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan massal dan lingkungan yang tidak sesuai dengan taraf hidup manusia akan menimbulkan kemunduran untuk membentuk tatanan dunia yang lebih, mengancam perdamaian dunia dan kestabilan dunia.

Melihat keadaan seperti ini negara-negara anggota Gerakan Non Blok sangat prihatin atas dampak negatif pada ekonomi dunia yang disebabkan oleh banyaknya alokasi anggaran untuk militer padahal keadaan dunia pada saat ini tidak terlalu membutuhkan pasokan senjata melainkan pasokan makanan. Sumber penghasilan negara yang sebagian besar di alokasikan ke dalam bidang militer lebih baik di alokasikan untuk pengembangan ekonomi, sosial dan mengembangkan ilmu teknologi dan pendidikan untuk negara itu sendiri. Keinginan negara anggota Gerakan Non Blok menyampaikan hal ini dikarenakan Gerakan Non Blok ingin memfasilitasi tercapainya suatu keamanan dunia yang dilakukan dengan cara pengurangan senjata bagi setiap negara yang ada di dunia.

Daftar Pustaka

Arsip :

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Panitia Nasional Konferensi Tingkat Tinggi GNB X.

Koran dan majalah :

Majalah Tempo, 5 September 1992, hlm. 25.

Majalah Straits Times, 17 Agustus 1987, hlm. 18.

Jawa Pos, Senin 31 Agustus 1992, hlm. 6

Buku :

Teuku Rezasyah, *Politik Luar Negeri Indonesia : Antara Idealisme dan Praktik*, (Bandung: Humaniora, 2008), hlm. 15.

Mohammad Hatta, *Indonesia dan Non-Alignment*, (Jakarta : Bulan Bintang 1982), hlm. 11.

Rajesh Kumar, *Non-Alignment Policy of Indonesia*, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1997), hlm. 12.

Abubakar Eby Hara, *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri dari Realisme sampai Konstruktivisme*, (Bandung : Nuansa, 2011), hlm. 57.

Haris Munandar, *Politik, Ekonomi, Strategi*, (Jakarta : PT Gramedia, 1995), hlm. 102.

Hatta Mohammad, *Indonesia dan Non-Alignment*. Hlm. 145.

Hans J Morgenthau, *Politik Antar Bangsa*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1991), hlm. 617.

Jurnal :

Aminuddin Kasdi, *Memahami Sejarah*, (Surabaya : Unesa University Press, 2011), hlm. 10-11.
Untuk melihat kondisi peralihan Soekarno kepada Soeharto, lihat M.C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since 1300* (California: Stanford University Press, 1993), hlm. 284-303.

